

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,28% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,25% (yoy). Namun demikian, capaian inflasi tahunan tersebut masih lebih rendah dibandingkan triwulan III pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,46% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat juga lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,60% (yoy). Meningkatnya inflasi Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan tren meningkatnya tekanan harga yang berlangsung di tingkat nasional maupun di kawasan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan inflasi terendah kedua di kawasan Jawa pada triwulan laporan. Perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting pada triwulan laporan tercatat tekanannya tidak terlalu besar pada inflasi. Peningkatan harga kebutuhan pokok hortikultura yang menjadi pendorong inflasi pada dua triwulan sebelumnya tekanannya sudah mulai mereda. meskipun beberapa komoditas hortikultura seperti Tomat dan Jagung manis yang mengindikasikan kenaikan harga masing-masing sebesar 35,84% (yoy) dan 23,72% (yoy). Selain itu beberapa barang penting seperti besi beton dan baja ringan juga mengalami peningkatan harga lebih dari 20% (yoy). Mencermati hal tersebut, risiko inflasi yang perlu dicermati ke depan, antara lain: menurunnya pasokan kebutuhan pokok seiring dengan akhir masa panen di saat mulai meningkatnya permintaan yang dipengaruhi oleh faktor perayaan natal dan tahun baru, meningkatnya harga material bangunan seiring dengan kembali dilanjutkannya berbagai proyek strategis nasional dan pembangunan kawasan industri di Jawa Tengah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III 2021 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Pendidikan. Peningkatan tekanan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama bersumber dari kenaikan harga pada sub-kelompok Makanan, terutama bawang merah dan daging ayam ras. Tekanan harga pada komoditas bawang merah disebabkan oleh menurunnya pasokan produksi paska panen raya sepanjang bulan Maret-Juni 2021. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh meningkatnya biaya produksi akibat tren peningkatan harga pakan ternak. Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan III 2021 mengalami peningkatan inflasi dibandingkan triwulan lalu. Realisasi inflasi yang paling tinggi berlangsung di kota Surakarta yang utamanya didorong oleh peningkatan tekanan harga Kelompok Pendidikan, yang berlangsung lebih kuat dibandingkan kota lainnya. Sementara inflasi terendah terjadi di Kota Tegal, disebabkan penurunan tekanan inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada Juli 2021, yaitu: • Rapat Koordinasi wilayah Terkait Kesiapan TPID Selama Periode PPKM □ TPID Jawa Tengah telah melakukan rapat teknis dan rapat koordinasi wilayah yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh seluruh ketua TPID se-Kab/Kota di Jawa Tengah dengan agenda utama pembahasan, yaitu menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi disaat peningkatan level PPKM seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 varian Delta. • Surat edaran Keseragaman penerapan aturan terhadap angkutan barang di Jawa Tengah □ Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah melalui surat edaran yang dikeluarkan Sekda Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk menerapkan aturan yang sama, yaitu pengecualian persyaratan vaksin lengkap 2 kali terhadap pengemudi seluruh angkutan barang, terutama kebutuhan pokok masyarakat. • Koordinasi Penyekatan Jalan dengan Dishub dan Satgas Pangan □ Dishub Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjaga kelancaran transportasi barang kebutuhan pokok masyarakat terutama di lokasi-lokasi penyekatan selama PPKM. Kemudian satgas pangan senantiasa memantau kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM. 2. Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Agustus dan September 2021, yaitu: • Inisiasi penambahan jumlah BUMP di Jawa Tengah □ TPID Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan menginisiasi penambahan jumlah Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Jawa Tengah, dimana tahun ini direncanakan penambahan BUMP sebanyak 10 entitas yang tersebar di beberapa Kab/Kota di Jawa Tengah. • Koordinasi Langkah-langkah Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok seiring mulai meningkatnya permintaan masyarakat karena penurunan level PPKM • Koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog, terkait rencana operasi pasar untuk komoditas beras, sejalan dengan program nasional, Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). • Pemanfaatan data neraca produksi pangan pada aplikasi Sistem Logistik Daerah yang meliputi volume produksi dan stok perdagangan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, untuk pengambilan keputusan intervensi pasar murah oleh Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejauh ini implementasi kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin pada Inflasi tahunan pada triwulan laporan terpantau sebesar 1,28% (yoy), atau mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 1,25% (yoy). Pencapaian tersebut masih lebih baik daripada peningkatan inflasi nasional dari 1,33% (yoy) menjadi sebesar 1,60% (yoy). Terkendalnya laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan laporan tidak lepas dari langkah antisipatif yang dilakukan TPID menjelang penerapan PPKM oleh pemerintah yang dimulai pada awal Juli. Surat edaran mengenai keseragaman penerapan aturan bagi angkutan barang terutama kebutuhan pokok masyarakat dipatuhi oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga distribusi barang selama PPKM tidak mengalami gangguan yang cukup berarti. Disamping itu, diseminasi informasi yang seragam di seluruh Kabupaten Kota dapat mengendalikan ekspektasi masyarakat terhadap permintaan barang dan jasa. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan mulai diturunkannya level PPKM.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya pengendalian inflasi Jawa Tengah ke depan, diantaranya: a Berperan aktif dalam memantau ketersediaan dan kelancaran distribusi produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, karena pada triwulan depan merupakan akhir masa panen komoditas pangan di Jawa Tengah b Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan harga dan pasokan menggunakan sistem informasi Sihati dan Sislogda. c Menjalankan strategi komunikasi efektif dengan talkshow di media massa untuk menjaga ekspektasi masyarakat menjelang akhir tahun dan mengendalikan permintaan masyarakat seiring dengan pelonggaran PPKM d Percepatan pembentukan 10 BUMP sebagai upaya penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar petani di Jawa Tengah